

## Implementasi Program Puspaga Dalam Pemberdayaan Masyarakat Wilayah RW 06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya

**Elisa Salsabilla**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Eddy Wahyudi**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya

Korespondensi penulis : [elisasalsabillah366@gmail.com](mailto:elisasalsabillah366@gmail.com)

**Abstract.** *Child abuse is a serious issue that requires serious attention. In Surabaya City, the implementation of the PUSPAGA Program (Family Learning Center) is an effort to prevent child abuse. This program has clear objectives and is supported by competent human resources. Although the program has been running, there are challenges in reaching all target groups and responding to changes in the community. This research uses the Policy Implementation theory by Merilee S. Grindle to analyze the program's implementation. The results of the research indicate that the content of the PUSPAGA Program policy has been well explained, but it is not fully understood by the target groups. The human resources involved in the program are already competent, but there are challenges in responding to changes in the community. Thus, the PUSPAGA program in Surabaya City has the potential to enhance community empowerment in the prevention of child abuse. However, further efforts are needed to ensure that all target groups understand and support the program, as well as to improve responsiveness to changes in the community.*

**Keywords:** *Family, Public Policy, PUSPAGA*

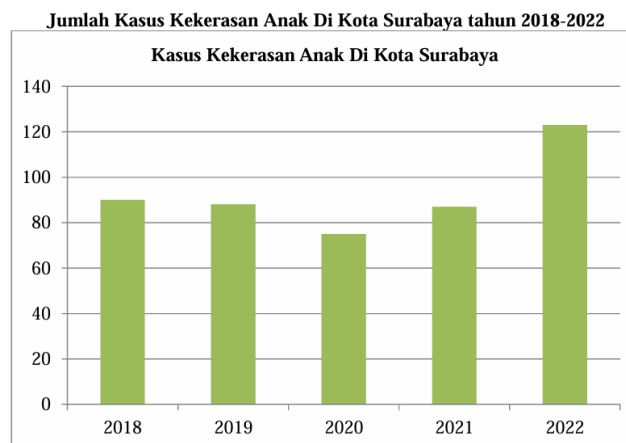
**Abstrak.** Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan serius. Di Kota Surabaya, implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Program ini memiliki tujuan yang jelas dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Meskipun program ini telah berjalan, terdapat kendala dalam mencapai seluruh kelompok sasaran dan dalam merespons perubahan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan Program PUSPAGA telah dijelaskan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh kelompok sasaran. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini sudah cukup kompeten, tetapi terdapat kendala dalam merespons perubahan masyarakat. Dengan demikian, program PUSPAGA di Kota Surabaya memiliki potensi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh kelompok sasaran memahami dan mendukung program ini, serta untuk meningkatkan respons terhadap perubahan dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Keluarga, Kebijakan Publik, PUSPAGA

## LATAR BELAKANG

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indoensia tentunya berbeda di setiap wilayahnya. Contohnya adalah Kota Surabaya, Kota Surabaya merupakan ibu kota sekaligus Kota terbesar di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya juga menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta di Indonesia. Menjadi kota terbesar tentu tidak lepas dari berbagai masalah sosial yang ada, salah satunya ialah kasus kekerasan terhadap anak. Berikut adalah jumlah kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Surabaya, pada tahun 2018 sebanyak 90 kasus, tahun 2019 sebanyak 88 kasus, tahun 2020 sebanyak 75 kasus, 2021 sebanyak 87 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 123 kasus.

Permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak menjadi permasalahan yang tidak ada hentinya dan menjadi isu dalam masyarakat. Banyak sekali pemberitaan di media baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang “Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Muhammad, 2022) dalam Boreel (2022:3)



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), telah menetapkan “Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)” sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk membantu daerah dalam penguatan kelembagaan PUSPAGA; memperkuat kapasitas PUSPAGA dalam layanan pengasuhan anak berbasis hak anak; dan meningkatkan layanan PUSPAGA menjadi unit pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga.

PUSPAGA merupakan one stop services atau layanan satu pintu keluarga berbasis Hak Anak yang dilakukan oleh tenaga profesi/psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak, dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan.

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Walikota Surabaya Tri Rismaharini meresmikan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada tanggal 9 Januari 2017 di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, yang merupakan layanan satu pintu keluarga berbasis Hak Anak yang dilakukan oleh tenaga profesi/psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak, dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan. Kehadiran Puspaga selaras dengan predikat Surabaya sebagai kota layak anak yang mengedepankan kesetaraan gender, pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia. Prinsip tersebut diharapkan dapat membuat PUSPAGA lebih dekat dengan keluarga dan dapat dijangkau bagi keluarga manapun untuk mendapatkan layanan konseling, konsultasi, dan mendapatkan informasi terkait pengetahuan dan keterampilan menjadi orang tua sesuai hak anak.

Implementasi Program PUSPAGA nyata terlihat pada Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Nomor : 188.4/710/436.7.8/2022 Tentang Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Standar Pelayanan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Meliputi :

1. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
2. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (Pptp2A)
3. Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi

Produk pelayanan PUSPAGA yaitu, Kegiatan bimbingan masyarakat (penyadaran, sosialisasi, pendampingan keluarga); Konseling; Konsultasi; Penjangkauan; Rujukan. Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang Langsung , Warga menulis buku tamu di meja informasi
2. Kotak Saran, Warga menulis pada form yang telah disiapkan
3. Telepon/chat melalui hotline, Warga dapat menghubungi melalui nomor telepon

087722288959

4. Media Sosial, Warga dapat mengirimkan pengaduan tertulis melalui direct message Instagram dan Facebook, Ig : @puspaga.sby, Facebook : puspaga.sub@gmail.com

Menurut Grindle (dalam Leo Agustino, Ph.D 2020:159) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) Dapat disimpulkan bahwa Program PUSPAGA ini dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan- kegiatan yang ada dalam pelayanan PUSPAGA, tetapi program ini belum maksimal berjalan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program PUSPAGA di Balai RW 06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program menurut Mulyadi (dalam Khuswatun Chasanah, 2017:15). Menurut Grindle (dalam Leo Agustino, Ph.D 2020:159) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Dalam implementasinya, Grindle menyatakan ada implementasi content of policy yaitu isi kebijakan dan context of policy yakni lingkungan kebijakan. Dalam content of policy atau isi kebijakan terdiri dari kepentingan apa yang mempengaruhi kebijakan, manfaat yang diterima, kondisi perubahan yang dicapai, serta mekanisme pelayanan PUSPAGA. Menurut

peneliti manfaat yang diterima masyarakat cukup besar dilihat dari hasil wawancara dengan klien saat pengaduan di layanan PUSPAGA. Melalui kebijakan tersebut diharapkan warga yang mendapatkan permasalahan dalam rumah tangga atau pola pengasuhan anak dan tindak kekerasan bisa dilaporkan ke hotline layanan PUSPAGA. Plus minus dalam suatu kebijakan itu sudah pasti ada. Sedangkan kebijakan tersebut menginginkan adanya perubahan kondisi pada masyarakat. Menurut peneliti, kondisi masyarakat berubah secara perlahan yang baik dengan adanya kelas online parenting yang diadakan setiap hari Selasa.

Sedangkan context of policy atau lingkungan kebijakan yang berisi strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana belum mendukung program tersebut. Melihat suatu kebijakan selalu ada berbagai kepentingan di dalamnya. Dalam hal ini peneliti melihat berbagai kepentingan dalam proses kebijakan seperti adanya kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan rakyat. Disini peneliti melihat dalam hal strategi aktor yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, Kelurahan Sidodadi ini sudah mengontrol pelaksanaan kebijakan, namun terkadang kualitas dari para birokrasi ini yang kurang dalam merespon masyarakat.

## **2. Program PUSPAGA**

PUSPAGA merupakan one stop services atau layanan satu pintu keluarga berbasis Hak Anak yang dilakukan oleh tenaga profesi/psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak, dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan. Program PUSPAGA hadir dengan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, mudah diakses dengan sarana yang penuh warna, mempunyai konsep layanannya yang juga dikenal, seperti nyaman dan menyenangkan. Prinsip tersebut diharapkan dapat membuat Program PUSPAGA lebih dekat dengan keluarga dan dapat dijangkau bagi keluarga manapun untuk mendapatkan layanan konseling, konsultasi dan mendapatkan informasi terkait pengetahuan serta keterampilan menjadi orang tua sesuai hak anak.(Idama, 2019) dalam Boreel (2022:3)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh

subjek penelitian, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2015:6 dalam Khuswatun Chasanah, 2017:18)

Sumber data dalam penelitian ini meliputi 2 jenis sumber yang meliputi Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Ibu koordinator PUSPAGA RW 06 dan Ibu Ketua RW 06. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya melalui pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi. Wawancara adalah sebuah proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Observasi merupakan sebuah kegiatan pengamatan langsung pada objek yang sedang diamati dengan memusatkan fokus perhatian pada fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk melihat interaksi nyata antara objek penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat langsung.

Miles dan Huberman dari (Tarantika & Megawati, 2022) menjelaskan untuk menganalisis data penelitian. Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas melalui Pengumpulan Data Langkah ini yaitu mengubah hasil wawancara suara menjadi sebuah teks (transkrip), memindai materi, mengetik data lapangan atau menyortir. dan mengatur data ke dalam berbagai jenis yang berbeda dari sumber informasinya, Reduksi Data (Data Reduction) Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi, Penyajian Data (Data Display) Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lalu dianalisis yang kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), dan CD (Catatan Dokumentasi). Setelah pengumpulan data, peneliti menyusun item terkait ke dalam kategori atau kelompok untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

Tindakan terpenting kedua dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan fakta yang disusun sehingga memungkinkan adanya potensi untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing Verification) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), telah menetapkan “Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)” sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk membantu daerah dalam penguatan kelembagaan PUSPAGA; memperkuat kapasitas PUSPAGA dalam layanan pengasuhan anak berbasis hak anak; dan meningkatkan layanan PUSPAGA menjadi unit pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga.

PUSPAGA merupakan one stop services atau layanan satu pintu keluarga berbasis Hak Anak yang dilakukan oleh tenaga profesi/psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak, dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Fokus dari penelitian ini menggunakan Teori Grindle yaitu ingin mengetahui Implementasi Program PUSPAGA dalam Pemberdayaan Masyarakat Wilayah RW 06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Dengan menggunakan Teori Grindle keberhasilan implementasi di pengaruhi oleh :

### **1. Dilihat dari prosesnya**

Dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Selama bulan september 2023 ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya rutin mengadakan kelas parenting melalui program PUSPAGA. PUSPAGA Kota Surabaya dalam Kelas parenting ini diadakan di Balai RW yang dihadiri oleh KSH, warga, kartar, dan sebagainya. Di setiap kelas parenting



tersebut mengusung materi atau tema tentang pola pengasuhan anak. Narasumber yang mengisi kelas parenting ini juga berbeda-beda sesuai tema yang ditentukan. Berikut tema kelas parenting antara lain, Manajemen Stress untuk Orang Tua, Membangun Komunikasi yang Efektif di Dalam Keluarga, Peran Orang Tua.

## **2. Apakah tujuan kebijakan tercapai**

Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :

- a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. Kelas parenting ini berjalan sesuai semestinya. Selama kegiatan zoom ini berjalan, warga dan ksh juga aktif untuk memberi pertanyaan jikalau mereka kurang paham atas materi yang disampaikan atau pertanyaan mengenai solusi dalam masalah sesuai materi atau tema yang disampaikan. Kelas parenting ini akan berlanjut terus karena materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi orang tua dalam pola pengasuhan anak. Program ini bisa membuat kecerdasan anak dan sebagainya, dan penurunan stunting.
- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

RW 06 merupakan salah satu RW dari tujuh RW di Kelurahan Sidodadi yang sudah ada program PUSPAGA sebelumnya. Akan tetapi masih sedikit kegiatan atau tidak sama sekali ada pelayanan, menurut Bu Elis Rosiva selaku Koordinator PUSPAGA RW 06. Menurut beliau pelayanan PUSPAGA sama seperti penanganan yang dilakukan Satgas PPA Kelurahan, jadi kasus yang masuk hanya ditangani sampai penjangkauan Satgas PPA Kelurahan, sehingga tidak masuk sebagai laporan PUSPAGA. Menurut Grindle (dalam Leo Agustino, Ph.D 2020:159) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) Dapat disimpulkan bahwa Program PUSPAGA ini dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan- kegiatan yang ada dalam pelayanan PUSPAGA, tetapi program ini belum maksimal berjalan. Dalam implementasinya, Grindle menyatakan ada implementasi content of policy yaitu isi kebijakan dan context of policy yakni lingkungan kebijakan.

### **1. Dalam content of policy atau isi kebijakan**

Terdiri dari kepentingan apa yang mempengaruhi kebijakan, manfaat yang diterima, kondisi perubahan yang dicapai, serta mekanisme pelayanan PUSPAGA. Menurut peneliti manfaat yang diterima masyarakat cukup besar dilihat dari hasil wawancara dengan klien



saat pengaduan di layanan PUSPAGA. Melalui kebijakan tersebut diharapkan warga yang mendapatkan permasalahan dalam rumah tangga atau pola pengasuhan anak dan tindak kekerasan bisa dilaporkan ke hotline layanan PUSPAGA. Plus minus dalam suatu kebijakan itu sudah pasti ada. Sedangkan kebijakan tersebut menginginkan adanya perubahan kondisi pada masyarakat. Menurut peneliti, kondisi masyarakat berubah secara perlahan yang baik dengan adanya kelas online parenting yang diadakan setiap hari Selasa.

## **2. Context of policy atau lingkungan kebijakan**

Berisi strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana belum mendukung program tersebut. Melihat suatu kebijakan selalu ada berbagai kepentingan di dalamnya. Dalam hal ini peneliti melihat berbagai kepentingan dalam proses kebijakan seperti adanya kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan rakyat. Disini peneliti melihat dalam hal strategi aktor yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, Kelurahan Sidodadi ini sudah mengontrol pelaksanaan kebijakan, namun terkadang kualitas dari para birokrasi ini yang kurang dalam merespon masyarakat.

Pembahasan ini merupakan rangkuman dari hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui aspek –aspek apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program PUSPAGA Dalam Pemberdayaan Masyarakat Wilayah RW 06 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle. 1. Isi Kebijakan (Content Of Policy) : (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan Sebagaimana program ini bertujuan untuk mencapai masyarakat sehat melalui Germas, maka dari itu yang diutamakan dalam program ini yaitu seluruh masyarakat dalam hal ini masyarakat Kota Surabaya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Program PUSPAGA(Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Kota Surabaya dengan menggunakan teori Grindle dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Surabaya diketahui secara jelas oleh para staff Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Surabaya maupun para pengurus

PUSPAGA. Sedangkan dalam sasaran Program PUSPAGA dalam pelaksanaannya belum semuanya mengetahui terkait dengan program tersebut.

2. Sumber-sumber Kebijakan tersedia dan mencukupi. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Surabaya dapat dikatakan sudah mencukupi dimana dalam kepengurusan PUSPAGA terdapat tenaga profesional. Kesiapan dan kemampuan/kompetensi juga dikatakan sudah baik dan mereka merupakan orang-orang kompeten yang mempunyai kesiapan dan bekal ilmu yang baik mengenai Program PUSPAGA. Sementara ketersediaan anggaran dalam pelaksanaannya dapat dikatakan mencukupi baik dengan kebutuhan kegiatannya maupun dengan operasionalnya. (*KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*, n.d.)

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdulhakkam, A. I., & Gunarsi, S. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajaran Keluarga Dalam Gerakan Jo Kawin Bocah (Studi Kasus Di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Adhiyat, S. A. R. (2022). Implementasi Peraturan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Merealisasikan Perlindungan Khusus Di Kota Bogor Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 93-104.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal Of Public Administration (Ijpa)*, 3, 12–32. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>
- Dewi, W. A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>
- Kania, I. (2022). Family Learning Center Service Innovation in The Implementation of Children's Education During The Covid-19 Pandemic. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5256-5262.
- kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. (n.d.). Retrieved October 31, 2023, from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/3329/pedoman-standar-pusat-pembelajaran-keluarga-puspaga>
- Kurniawan, B. A., & Zalzabilla, P. A. (2023). Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya. *Public Sphere Review*, 114-122.
- Ngongoloy, V. R., KIMBAL, M., & WAWORUNDENG, W. (2019). Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80).
- Rachman, R. F. (2019). Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Dan Remaja Di Surabaya. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 8(2), 77-91.